

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: i-xx
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018
p-ISSN : 1978-2292 (print)
e-ISSN : 2579-7425 (online)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM 4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Ketua Dewan Redaksi *(Editor)*	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Anggota Dewan Redaksi *(Section Editor)*	:	1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 4. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S., M.Si. 5. Ahmad Jazuli,S.Ag., M.H. 6. Haryono, S.Sos., M.H. 7. Imam Lukito, S.T., M.H. 8. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
Redaksi Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Sekretaris	:	1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 2. Ibnu Prasetyo, S.H.
Penyunting Tata Bahasa dan Naskah *(Copyeditor)*	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. B. Lora Christyanti, S.IP. 3. Amirah Balqis S.H. 4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos. 5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.
Teknologi Sistem Informasi	:	1. Machyudhie, S.T. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Harysandy Permana, S.Kom. 4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954
ejournalkebijakan@gmail.com

HALAMAN KOSONG

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
   Universitas Indonesia

2. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.LM., Ph.D.
   Universitas Padjadjaran

3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
   Universitas Hasanuddin

4. Dr. Asep Kurnia
   Kementerian Hukum dan HAM R.I

5. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
   Universitas Islam Indonesia

6. Dr. Edy Santoso, S.H., M.H.
   Kementerian Hukum dan HAM R.I

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia 183-200
   Sudjana
2. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD 201-222
   Asri Lasatu
3. Pengaruh *Work From Home* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan 223-242
   Rezeky Ana Ashal
4. Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi..... 243-262
   Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati
5. Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia 263-284
   Padmono Wibowo
6. Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan 285-312
   Henry Donald Lbn. Toruan
7. Mekanisme Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 313-338
   Oki Wahju Budijanto
8. Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 339-360
   Imam Lukito, Haryono

TINJAUAN HUKUM *(REVIEW)*

9. Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia 361-384
   Mohammad Kamil Ardiansyah
10. Kajian Filosofis Prinsip *Audi Et Alteram Partem* Dalam Perkara Perdata..... 385-402
    Dwi Handayani

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Mulai Volume 14 Nomor 2, Juli 2020 ini, redaksi menambah jumlah artikel menjadi 10 per terbitan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia, mulai dari kewarganegaraan, administrasi hukum umum, keimigrasian, peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, hingga pengawasan. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM namun juga dari Institusi / Akademisi dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

HALAMAN KOSONG

Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Sudjana

Progressivity of Protection on Creators in Encouraging Creative Economy in Indonesia

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

Local regulation is an instrument for the administration of local government formed by the Regional People's Representative Assembly (DPRD) and the regional government. Therefore, its formation must meet legal drafting standards starting from the planning stage. The plan regulates the preparation mechanism for the formation of local regulation (Propemperda) by the DPRD and the regional government, it is determined in the DPRD's Decision. This research discusses what factors influence the preparation of the local regulation, and what is the urgency to formalize local regulation regarding the mechanism for preparing Propemperda. This empirical study uses primary and secondary data. The analysis was conducted qualitatively and resulted in the analytic description. The results revealed that the various factors of budget, time, community, and drafter, were very influential in the preparation of Propemperda. The formation of local regulation in Sigi Regency was not effective and efficient yet, due to the absence of local regulation that detailed the mechanism for preparing Propemperda. Therefore, all respondents and stakeholders suggesting the formation of a local regulation as the planning instrument for Propemperda which will be carried out in a planned, integrated, and systematic manner.

Keywords: *progression; protection; creator; creative economy.*

Asri Lasatu

The Urgency of Local Regulation Concerning the Formation of Local Regulation Program on Regional House of Representatives Performance

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

Local regulation is an instrument for the administration of local government formed by the Regional People's Representative Assembly (DPRD) and the regional government. Therefore, its formation must meet legal drafting standards starting from the planning stage. The plan regulates the preparation mechanism for the formation of local regulation (Propemperda) by the DPRD and the regional government, it is determined in the DPRD's Decision. This research discusses what factors influence the preparation of the local regulation and what is the urgency to formalize local regulation regarding the mechanism for preparing Propemperda? This empirical study conducted in Sigi Regency by using primary and secondary data. The analysis was conducted qualitatively and results in the analytic description. The results revealed that the various factors of budget, time, community, and drafter, were very influential in the preparation of Propemperda. The formation of local regulation in Sigi Regency was not effective and efficient yet, due to the absence of local regulation that detailed the mechanism for preparing Propemperda. Therefore, all respondents and stakeholders suggesting the formation of a local regulation as the planning instrument for Propemperda which will be carried out in a planned, integrated, and systematic manner.

Keywords: *local regulation; local government; regional people's representative assembly; autonomy.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Rezeky Ana Ashal

Effect of Work from Home on State Civil Apparatus Performance at Special Class I Immigration Office TPI Medan

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

The Indonesian President in his press conference instructed the entire community to implement social distancing, which is Work from Home, study at home, and worship at home in order to increase awareness of the spread of Covid-19. Therefore, this research has several focuses. The first is to find out how the implementation of Work from Home in the Class I Immigration Office Special TPI Medan. Second, are there any inhibiting factors in the implementation of Work from Home in the Immigration Class I Office of the Special TPI Medan and what effect Work from Home has on the performance of the State Civil Apparatus. Data obtained from the results of this study were processed using qualitative descriptive analysis by taking data from each Section and Field report at the Immigration Class I Office Special TPI Medan. Besides, a literature study related to Work from Home itself is also conducted to determine its effect on the performance of the State Civil Apparatus. The results obtained that the implementation of Work from Home in Immigration Office Class I Special TPI Medan is running well. No significant inhibiting performance factors were found, and the employee's performance can be maintained to keep prioritizing excellent service and not to rule out the existing health protocols.

Keywords: *work from home, performance, aparatur sipil negara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.*

Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati

Immigration Control Policy in Indonesia: Public Service Delivery and Professionalism of Immigration Officers

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

This study examines the public service delivery in immigration control and to identify characters, ethics, and competencies of immigration officers at borders in Indonesia towards professionalism. Arising issues due to divergent understandings, perspectives, and paradigms of public service delivery in immigration control and shortcomings of competencies, characters, and ethics of immigration officers in immigration control at borders. This paper employs the qualitative research method with a document analysis approach by collecting data of journal articles, books, regulations, and reports from organizations. The data analysis refers to the theoretical and conceptual framework to propose a model or concept. This study shows the public service delivery in immigration control is different from that in other public sectors because of aspects of border security, border management, and information technology at borders. Immigration officers account characters in immigration control using professional courtesy, not 'hospitality', and this study recommends eight competencies and its elements.

Keywords: *immigration clearance; public service delivery; immigration officers.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Padmono Wibowo

The Importance of Risk Mitigation of Overcrowding Impact in Correctional Institution and State Detention Centers in Indonesia

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

The level of overcrowding of inmates (prisoners and detainees) of Correctional Institutions (LAPAS) and State Detention Centers (RUTAN) in Indonesia is getting higher. Overcrowding has occurred since the 1990s, and until early 2020 it has reached 103% of the occupancy capacity. Overcrowding in 326 Correctional Institutions in Indonesia reached 261 Correctional Institutions or 80.06% while the overcrowding in 165 State Detention Centers reached 142 State Detention Centers or 86.06%. The impact arising from the high degree of overcrowding is the rise of security and order disturbances, the spread of infectious diseases, a decrease in the quality of life of failure in achieving the goals of Correctional Development. Unexpected condition is the occurrence of humanitarian disasters instead of being a place of punishment, Correctional Institutions and State Detention Centers are the worst places where human rights cannot be protected. Efforts are needed to mitigate the risk of the impact of the overcrowding of inmates of the Correctional Institutions and State Detention Centers, and it is necessary to develop a strategy for prevention, mitigation and management. This research uses a qualitative approach. Results of this study are analysis the risk mitigation of the impact of the overcrowding of inmates of the Correctional Institutions and State Detention Centers in Indonesia. This research hoped to provide mitigation overview of the overcrowding impact in Indonesia and efforts to reduce the level of overcrowding and how optimal the policies that have been taken in preventing, overcoming, and handling the overcrowding. It is also hoped that through this research, it can provide an overview of mitigating the risk of the impact of the overcrowding of inmates of Correctional Institutions and State Detention Centers in Indonesia.

Keywords: *mitigation; risk overcrowding; inmates.*

Henry Donald Lbn. Toruan

Legal Effectiveness Storage of Confiscated Goods in Rupbasan

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

Protection of ownership of goods is guaranteed in the 1945 Constitution unless the goods are obtained unlawfully. Thus, the state can make a forced effort against its citizens if it is suspected/ charged with committing an act that violates the law. Law enforcement officials can confiscate the proceeds of the crime as evidence in the level of investigation, prosecution, trial including items seized based on the judge's decision. The confiscated goods are based on Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 44 paragraph (1) State confiscated objects are kept in a State Confiscated Object Storage House. However, the problem is that many confiscated goods are not stored in Rupbasan but are kept in various institutions/institutions which have the authority to investigate. The problem is, how is the effectiveness of the Rupbasan authority in the storage of confiscated goods? What factors are Rupbasan's constraints in carrying out the task of storing confiscated goods? How to optimize the Rupbasan function ?. The research method used in this paper is normative-empirical legal research with the nature of descriptive-analytic research. Data collection conducted in this study is the study of documents and interviews. The legal effectiveness storage of confiscated goods in Rupbasan is intended to assess the extent the effectiveness of the Criminal Procedure Code and the regulation is implemented by the law enforcement official.

Keyword: *effectiveness; storage of confiscated goods; rupbasan.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Oki Wahju Budijanto

Internal Control Mechanism Ministry of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

Inspectorate General as an element of internal control must be able to formulate a strategic policy direction, but still face obstacles including not fully answering the substance of the problem and not yet optimizing effective communication according to internal control mechanisms. The internal control mechanism is important to see the work as planned. This paper aims to determine and analyze the implementation of internal oversight mechanisms within the Ministry of Law and Human Rights and the constraints they face. This paper uses qualitative methods with primary data collection techniques through interviews and secondary data. Based on the results of the evaluation that has been done illustrates that the internal control mechanism within the Ministry of Law and Human Rights has not run as expected. To improve, it is necessary to: (1) revise the guidance for supervision assignments. (2) establishment of the Audit Committee. (3) improve the standard operating procedures. (4) the addition of auditors and technical training. (5) Development of SIMWAS that provides data and processes on-line real-time. (6) consistently and continuously implementing the internal control system.

Keywords: *mechanism; system; control; internal.*

Imam Lukito, Haryono

Optimizing Education and Training E-Learning Methods within the Ministry of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

Policy and management State Civil Apparatus based on a merit system that emphasizes aspects of qualifications, competencies, and performance. In the context of accelerating employee competency development, BPSDM Law and Human Rights have implemented the e-learning method. This paper discusses the development strategies of the Law and Human Rights Ministry officials competency development. This research is desk research with a qualitative approach. From the analysis, it is known that e-learning is an alternative to developing competence in providing training opportunities for all employees to increase their knowledge. The organizers must come up with strategies to develop the use of e-learning so that the goal of developing competency is best achieved improved work skills. The policy recommendations including optimizing Competency Base Human Resource Information System for competency mapping, implementing blended learning and developing full e-learning for technical expertise competencies, developing and implementing modernization of e-learning technology, making e-learning as the requirement for following a classical training and increasing knowledge contents in e-learning systems.

Keywords: *strategy; e-learning; competency.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mohammad Kamil Ardiansyah

Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law

Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 2, Juli 2020

This study aims to examine legal reform by The Supreme Court of Indonesia facing the legal vacuum in civil procedure law. The research method used is a normative legal research method using the statute approach, historical approach, and conceptual approach. The results of this study indicate legal reform by The Supreme Court of Indonesia facing the legal vacuum in civil procedure law is through the judgment of the court, the jurisprudence of the supreme court, the doctrine of the supreme judges through the formulation of the plenary meeting results that outlined in the Supreme Court Circular (SEMA), and finally through the formation of Supreme Court Regulation (Perma).

Keywords: *civil procedure law; Indonesia's supreme court; legal reform.*

Dwi Handayani

Philosophical Study of The Principle of Audi et Alteram Partem in Civil Cases

The phenomenon of injustice that arises at this time is inseparable from the existence of a civil case verdict that does not adequately reflect the fairness and balance of litigants in court, that injures the justice and legal certainty of the parties. The principle of Audi et alteram partem is a principle in the Civil Procedure Law which essentially means that the judge hears both parties litigate at trial. The legal issues raised in this paper are What is the underlying philosophy of Audi et alteram partem principles in civil cases? Normative legal research type, and will be analyzed using the statute approach and conceptual approach. The results of the research show that the basic philosophy of the Audi et alteram partem principle in civil cases is meaningful. There is a balance of rights, equality of opportunity to obtain justice according to human nature. Started from the decision that does not implement or override the principle of Audi et alteram partem. That is, the statement from one of the side does not include in the decision, Be ruled out (not heard) as a result of the judge is not binding to witness/expert statement because of the judge authority. Legal principles form the basis of the rule of law. To decreasing Audi principle mistakes, it should be regulated in the new Civil Procedure Law (adding an article to Law of Judicial Power: Law Number 48 of 2009). The principle of Audi et Alteram Partem is not the same as the principle of equality Before the Law.

Keywords: *philosophical basic; audi alteram partem; civil.*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Sudjana (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga pencipta potensial memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli. Kajian ini membahas tentang progresivitas pelindungan terhadap pencipta dalam mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data bersifat normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan adanya progresivitas pelindungan terhadap pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu waktu perlindungan lebih panjang, ketentuan tentang hak ekonomi termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, dan diaturnya Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menarik royalti dari pengguna hak cipta, sehingga dapat mendorong ekonomi kreatif. Namun substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu memperjelas makna “hubungan dinas”, dan menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan “lembaga yang berwenang dan cara menentukan “penaksiran nilai ekonomi” untuk Hak Cipta yang dijaminkan sebagai fidusia.

Kata kunci: progresivitas; pelindungan; pencipta; ekonomi kreatif.

Asri Lasatu (Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu)

Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD. Permasalahan penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi penyusunan Propemperda serta apa urgensi Pembentukan Peraturan daerah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa dilakukan secara kualitatif dan hasilnya bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor anggaran, waktu, masyarakat, dan drafter, sangat berpengaruh dalam penyusunan Propemperda, serta pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sigi belum efektif dan efisien karena belum adanya regulasi di daerah yang mengatur secara detail mekanisme penyusunan Propemperda. Olehnya, seluruh responden dan stake holders menyarankan pembentukan Peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan Propemperda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Kata kunci: peraturan daerah; pemerintah daerah; DPRD, otonomi.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Rezeky Ana Ashal (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, Medan)

Pengaruh *Work From Home* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Presiden Indonesia dalam konferensi persnya menginstruksikan kepada seluruh masyarakat agar menerapkan *social distancing*, yaitu kerja dari rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Terkait hal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa fokus, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Work from Home* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Kedua, apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan *Work from Home* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan apa pengaruh *Work from Home* terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil data dari setiap laporan Bagian dan Bidang di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Selain itu, studi pustaka terkait *Work from Home* itu sendiri juga dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan *Work from Home* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berjalan dengan baik, tidak ditemukan faktor penghambat yang terlalu berarti terhadap kinerja dan kinerja para pegawai tetap terjaga dengan tetap mengedepankan pelayanan prima dan tidak mengesampingkan protokol kesehatan yang ada.

Kata kunci: *work from home*, kinerja, aparatur sipil negara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

**Ridwan Arifin (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI),
Intan Nurkumalawati (BPSDM Hukum dan HAM Politeknik Imigrasi, Depok)**

Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Penelitian ini menganalisis bentuk pelayanan publik dalam pemeriksaan keimigrasian serta merumuskan karakter, etika, dan kompetensi petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia dalam kerangka profesionalisme. Permasalahan yang timbul adalah terdapat perbedaan pemahaman, perspektif, dan paradigma bentuk pelayanan publik dalam pemeriksaan keimigrasian dan terdapat perbedaan kompetensi, karakter, etika petugas imigrasi di TPI. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen (*document analysis*) digunakan dengan pengumpulan data berupa publikasi ilmiah, buku-buku, peraturan-peraturan, serta laporan dari organisasi. Analisis data menggunakan analisis teoretis dan konseptual yang dapat merekomendasikan suatu model atau konsep. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bentuk pelayanan publik dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI berbeda dengan pelayanan publik yang diterapkan di sektor publik lainnya karena ada aspek keamanan perbatasan, manajemen perbatasan, dan teknologi perbatasan. Karakter ASN sebagai petugas imigrasi di TPI menggunakan konsep professional courtesy bukan hospitality dengan rekomendasi berupa delapan kompetensi berikut elemennya.

Kata kunci: pemeriksaan keimigrasian; pelayanan publik; petugas imigrasi.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Padmono Wibowo (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI BPSDM Hukum dan HAM Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok)

Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah *overcrowded* meningkat tiap tahun dan terjadi dihampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah *overcrowded* adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perananan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses restorative justice, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitas narkotika. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani *overcrowded* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.

Kata kunci: *overcrowded*; lembaga pemasyarakatan; peranan pembimbing pemasyarakatan

Henry Donald Lbn. Toruan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Jakarta)

Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Perlindungan terhadap kepemilikan barang pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 kecuali barang tersebut diperoleh secara melawan hukum. Maka, negara dapat melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Barang hasil tindak pidana tersebut dapat disita aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Barang sitaan tersebut berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun persoalannya banyak barang sitaan tidak disimpan di Rupbasan melainkan disimpan diberbagai instansi/lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan. Permasalahannya, bagaimana efektivitas pengatuan kewenangan Rupbasan dalam penyimpanan barang sitaan?. Faktor-faktor apa yang merupakan kendala Rupbasan dalam melaksanakan tugas penyimpanan barang sitaan?. Bagaimana upaya mengoptimalkan fungsi Rupbasan?. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana efektivitas dari KUHAP dan peraturan pelaksanaannya dipatuhi oleh penegakan hukum pemangku kepentingan.

Kata kunci : efektivitas; penyimpanan barang sitaan; rupbasan.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Oki Wahju Budijanto (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Jakarta)

Mekanisme Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan intern harus dapat merumuskan arah kebijakan strategis, namun masih menghadapi kendala di antaranya adalah belum sepenuhnya menjawab substansi permasalahan dan belum optimalnya komunikasi efektif sesuai mekanisme pengawasan intern. Mekanisme pengawasan intern penting untuk melihat apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta kendala-kendala yang dihadapi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai dengan harapan. Dalam upaya perbaikan, maka perlu dilakukan: (1) merevisi pedoman penugasan pengawasan. (2) pembentukan Komite Audit. (3) memperbaiki standar operasional prosedur. (4) penambahan auditor dan pelatihan teknis. (5) Pengembangan SIMWAS yang menyediakan data dan proses secara on-line real time (OLRT). (6) secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan sistem pengawasan intern.

Kata kunci: mekanisme; sistem; pengawasan; intern.

Imam Lukito (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
Haryono (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Jakarta)

Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan *merit system* yang menekankan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam rangka percepatan pengembangan kompetensi pegawai, BPSDM Hukum dan HAM telah menerapkan metode *e-learning*. Tulisan ini membahas strategi pengembangan pemanfaatan *e-learning* dalam peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian *desk research* dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa pemanfaatan *e-learning* menjadi alternatif pengembangan kompetensi dalam memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya, pihak penyelenggara harus melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan pemanfaatan *e-learning* supaya tujuan pengembangan kompetensi dapat dicapai secara optimal berupa peningkatan keterampilan kerja. Adapun saran kebijakan antara lain: optimalisasi aplikasi CBHRIS untuk pemetaan kompetensi, menerapkan *blended learning* serta mengembangkan *full e-learning* untuk jenis kompetensi keahlian teknis, mengembangkan dan menerapkan modernisasi teknologi *e-learning*, menjadikan *e-learning* sebagai syarat mengikuti diklat klasikal, memperbanyak konten-konten pengetahuan dalam sistem *e-learning*.

Kata kunci: strategi; *e-learning*; kompetensi.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Mohammad Kamil Ardiansyah (Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat)

Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia adalah melalui putusan pengadilan, yurisprudensi mahkamah agung, doktrin para hakim agung melalui rumusan hasil r apat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Kata kunci: hukum acara perdata; mahkamah agung; pembaruan hukum.

Dwi Handayani (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar)

Kajian Filosofis Prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam Perkara Perdata

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020

Fenomena ketidakadilan yang muncul saat ini tidak terlepas dari adanya putusan perkara perdata kurang mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara di pengadilan, sehingga dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum pihak-pihak. Prinsip audi et alteram partem merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi dasar filosofi prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata?. Berjenis penelitian hukum Normatif, dan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, dasar filosofi prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata bermakna: adanya keseimbangan hak, persamaan kesempatan untuk memperoleh keadilan sesuai fitrah manusia. Dengan beranjak dari adanya putusan yang tidak menerapkan atau mengesampingkan prinsip audi et alteram partem antara lain, keterangan salah satu pihak tidak dimasukkan dalam putusan bahkan dikesampingkan (tidak didengar) sebagai akibat dari tidak terikatnya hakim pada keterangan saksi/ahli karena hal ini merupakan kewenangan hakim. Prinsip hukum menjadi dasar suatu aturan hukum. Untuk meminimalkan penyimpangan prinsip audi et alteram partem, seyogyanya segera diatur dalam UU Hukum Acara Perdata baru (menambahkan pasal pada UU Kekuasaan Kehakiman).

Kata kunci: dasar filosofis; audi alteram partem; perdata.